

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN ini menyajikan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat tahun 2023 yang diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan di masa mendatang. LAKIN Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun secara umum hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan di Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat tahun 2023 dapat memenuhi target, namun tidak dapat pula kami pungkiri masih ada beberapa indikator kinerja yang masih berproses. Kami berharap analisis dan evaluasi LAKIN Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 dapat memberikan dorongan dan semangat dari seluruh komponen khususnya di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sehingga penyelenggaraan kearsipan secara nasional dapat berjalan dengan baik dan benar yang pada akhirnya mempercepat perwujudan Good Governance dan Clean Government serta menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan edukasi.

Jakarta, 12 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat,

Florentinus Kristiartono

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	i
DAFT	AR ISI	ii
DAFT	AR TABEL	iii
DAFT	AR LAMPIRAN	iv
IKHTI	SAR EKSEKUTIF	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Gambaran Umum	2
1.3	Struktur Organisasi	3
1.4	Dasar Hukum	3
1.5	Isu Strategis Organisasi	4
1.6	Sistematika Ruang Lingkup dan Pelaporan	4
BAB I	I PERENCANAAN KINERJA	6
2.1	Rencana Strategis Tahun	6
2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	7
2.3	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023	8
2.4	Rencana Aksi Biro Perencanan dan Humas Tahun 2023	. 10
2.5	Rencana Penarikan Dana	.12
2.6	Metode Pengukuran	. 13
BAB I	II AKUNTABILITAS KINERJA	. 14
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	. 14
3.2	Realisasi Anggaran	. 21
BAB I	V PENUTUP	. 33
4.1	Kesimpulan	. 33
42	Saran	33

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1	Program, kegiatan, sasaran kegiatan dan target Biro Perencanaan dan
	Hubungan Masyarakat6
Tabel.2.2	Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 20237
Tabel.2.3	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 20239
Tabel.2.4	Revisi ke-1 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023 9
Tabel.2.5	Revisi ke-2 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023 10
Tabel.2.6	Rencana Aksi Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 10
Tabel.2.7	Rencana Penarikan Dana Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023
Tabel.2.8	Metode Pengukuran terhadap Indikator Kinerja13
Tabel.3.1	Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Humas Tahun 202314
Tabel.3.2	Nilai SAKIP ANRI Tahun 2022-202315
Tabel.3.3	Indeks Layanan Publik tahun 2022 -202316
Tabel.3.4	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) tahun 202317
Tabel.3.5	Indeks Kualitas Pelayanan Publik tahun 202317
Tabel.3.6	Detail Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik Tahun 2023
Tabel.3.7	Capaian Kinerja berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Tahun 2023
Tabel.3.8	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja35
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Revisi ke-137
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Revisi ke-239
Lampiran 4	Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja41
Lampiran 5	Laporan Capaian Realisasi Anggaran dan sampai dengan 31 Desember 2023
	(sumber dari data Emonev)43

IKHTISAR EKSEKUTIF



Sebagai bagian dari struktur organisasi ANRI berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat harus memberikan pelaporan mengenai akuntabilitas dan kinerja yang akan menjadi bagian dari laporan akuntabilitas dan kinerja yang akan menjadi bagian dari Laporan Akuntabilitas dan kinerja dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Dokumen

ini merupakan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih yakni:

- (1). penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- (2). pengelolaan administrasi kerja sama serta penyiapan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- (3). pengelolaan urusan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi, serta hubungan antar lembaga dan media social.

a. Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, bahwa target berdasarkan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terlah dicapai tersaji pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Kegiatan

Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	lı	ndikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
Meningkatnya Layanan	1.	Kategori Nilai SAKIP	BB (70,05)	B (69,19)	98,77
Perencanaan, Kerja Sama, Evaluasi dan	2.	Indeks Layanan Publik	A (93)	A (95)	102,15
Humas	3.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	81 (Baik)	96,34 (Sangat Baik)	118,94
	4.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,8	3,899	102,6
	5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80	97,47	121,83

Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

manator Kinorja Rogiatari Tanan 2020										
KODE KRO/RO		TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% REALISASI ANGGARAN	REALISASI FISIK	% REALISASI FISIK			
3615.EBA	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Layanan	4,258,969,000	4,242,057,820	99.60	2 Layanan	100			
3615.EBA.001	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama	1 Layanan	1,484,221,000	1,480,193,921	99.73	1 Layanan	100			
3615.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	2,774,748,000	2,761,863,899	99.54	1 Layanan	100			
3615.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	23 Dokumen	2,032,673,000	2,020,176,033	99.39	26 Dokumen	113,04			
3615.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9 Dokumen	1,404,986,000	1,402,270,299	99.81	9 Dokumen	100			
3615.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14 Dokumen	627,687,000	617,905,734	98.44	17 Dokumen	121,42			

Capaian rata-rata Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 105,35%. Terdapat 1 RO yang mencapai lebih dari 100% yaitu pada

RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan capaian 17 Dokumen dari target 14 Dokumen atau 121.4%.

b. Akuntabilitas Keuangan

- Pada tahun 2023 Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.291.642.000 (enam milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp6,262,233,853 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) atau 99,53% dari total anggaran Rp6.291.642.000 (enam milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
		(Rp)	(Rp)	(%)	
3615	Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerjasama, Humas dan Tata Usaha Pimpinan	6,291,642,000	6,262,233,853	99.53	
3615.EBA	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,258,969,000	4,242,057,820	99.60	
3615.EBA.001	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama	1,484,221,000	1,480,193,921	99.73	
3615.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	2,774,748,000	2,761,863,899	99.54	
3615.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,032,673,000	2,020,176,033	99.39	
3615.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,404,986,000	1,402,270,299	99.81	
3615.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	627,687,000	617,905,734	98.44	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bidang kearsipan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan menuju cita-cita luhur bangsa indonesia yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional bidang kearsipan tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan manajemen dari unit fasilitator. Salah satu fasilitator di ANRI adalah Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, di unit inilah yang akan memberikan menjadi fasilitator dalam merencanakan kegiatan serta dan anggaran yang direncanakan, layanan hubungannya dengan masyarakat serta layanan dengan masalah ketatausahaan pimpinan yang pastinya semuanya itu untuk mendukung seluruh kegiatan di ANRI.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional RI bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Demikian juga Biro Perencanaan dan Humas sebagai salah satu unit di ANRI juga wajib melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023.

1.2 Gambaran Umum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, secara khusus dibentuk Kelompok Kerja dari masing-masing fungsi yaitu:

- a. Fungsi penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran. Pelaksanaan fungsi dilaksanakan secara teknis oleh Tim Perencanaan Program dan Anggaran dituangkan dalam rencana kinerja tiap tahunnya yang diwujudkan dalam satu Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran.
- b. Fungsi pengelolaan administrasi kerja sama pada Kelompok Substansi Kerja Sama yang dikoordinasikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Kerja Sama. Pelaksanaan fungsi tersebut dituangkan dalam rencana kinerja tiap tahunnya diwujudkan dalam Output Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama.
- c. Fungsi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan yang merupakan kelompok kerja non Struktural yang dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Perencana Muda sebagai Ketua Tim Evaluasi dan Pejabat Fungsional Analis Anggaran Muda sebagai Ketua Tim Pelaporan. Pelaksanaan fungsi tersebut dituangkan dalam rencana kinerja tiap tahunnya diwujudkan dalam Output Layanan Pemantauan dan Evaluasi.
- d. Fungsi pengelolaan urusan Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi dan serta Hubungan antar Lembaga dan Sosial dilaksanakan secara teknis pada Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat yang merupakan kelompok kerja non struktural yang dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda sebagai Ketua Tim dan dibantu secara teknis oleh 3 (tiga) orang Ketua Kelompok Kerja yaitu:
 - 1. Kelompok Kerja Hubungan Antar Lembaga
 - 2. Kelompok Kerja Produksi dan Konten Kreatif
 - 3. Kelompok Kerja Komunikasi dan Informasi Publik

Pelaksanaan fungsi tersebut dituangkan dalam rencana kinerja tiap tahunnya yang diwujudkan dalam satu Output Layanan Hubungan Masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN HUMAS F. KRISTIARTONO KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Humas

www.anri.go.id 📵 😝 😉 🕝 @ArsipNasionalRl

1.4 Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- 7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI;
- Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Arsip Nasional Republik Indonesia 2020-2024;
- 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;
- Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01/6/2024 tanggal 3 Januari 2024 hal Permintaan Laporan Triwulan IV, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2023.

1.5 Isu Strategis Organisasi

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat mengangkat beberapa isu strategis Tahun 2023, yakni melaksanakan upaya-upaya dalam memperbaiki implementasi SAKIP ANRI guna meningkatkan nilai evaluasi SAKIP ANRI yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB sesuai target atau melebihi target nilai yang telah ditetapkan.

1.6 Sistematika Ruang Lingkup dan Pelaporan

Penyajian LAKIN terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif.

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Isu Strategis Organisasi
- 1.6 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Recana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
- 2.5 Rencana Penarikan Dana
- 2.6 Metode Pengukuran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Evaluasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Renstra adalah dokumen perencanaan ANRI untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2020-2024. ANRI wajib menyusun Renstra ANRI Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra ANRI Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran ANRI;
- b. arah kebijakan, dan strategi ANRI; dan
- c. target kinerja, dan kerangka pendanaan.

Adapun program, kegiatan, sasaran kegiatan, dan target unit kerja Biro Perencanaan dan Humas selama 5 (lima) tahun yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024.

Tabel.2.1 Program, kegiatan, sasaran kegiatan dan target Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

_ ,	Sasaran	Target Keluaran					Unit/Organisasi
Program/ Kegiatan	Program/ Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024	1
	Kegiatan/ Indikator						
PROGRAM A:DU MANAJEMEN Sasaran program Tata Kelola yang	: Terwujudnya						Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
Tata Notola yang	Meningkatnya layanan Perencanaan, Kerja Sama, Evaluasi dan Pelaporan dan Hubungan Masyarakat						Masyarakat
	Kategori Nilai SAKIP	В	В	BB	BB	BB	
	Layanan Perencanaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	

| Layanan
Hubungan
Masyarakat dan
Informasi | 1 Layanan | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Layanan
Protokoler | 1 Layanan | |
| Layanan
Hubungan
Masyarakat | 1 Layanan | |

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2023, yaitu pada Program Dukungan Manajemen. Berikut adalah Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 yaitu:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023

Kode	Kegiatan/RO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Rincian Output	Target	Alokasi Anggaran
3615	Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi Kerja Sama dan Humas	Kategori Nilai SAKIP	BB (70.05)	2.032.673.000
3615.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
3615.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9 Dokumen	1.404.986.000
3615.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	14 Laporan	627.687.000
3615	Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi Kerja Sama dan Humas	Indeks Layanan Publik	A (93)	4.258.969.000
3615.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				

3615.EBA.001	Layanan Hubungan Masyarakat dan informasi pada Unit Kerja Sama	Jumlah Layanan Hubungan Masyara dan Informasi pada Kerja Sama		1.484.221.000
3615.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Uni Kerja Sama	1 Layanan	2.774.748.000

Alokasi anggaran Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp6.291.642.000,-

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan PerMenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian kinerja Kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023 sampai dengan saat ini mengalami 2 kali perubahan yang disebabkan oleh Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Biro Perencanaan dan Tahun 2023 yang semula terdapat 2 Indikator menjadi 5 indikator Humas berdasarkan pada Keputusan Kepala ANRI Nomor 325 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik ANRI Tahun 2023-2024. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023 beserta revisinya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Kerja Sama,	1.	Kategori Nilai SAKIP	BB (70,05)
	Evaluasi dan Humas	2.	Indeks Layanan Publik	A

Kegiatan Anggaran (Rp):

Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama, dan Humas

6.922.217.000

Tabel 2.4 Revisi ke-1 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan Indikator Ki		Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Kerja Sama,		Kategori Nilai SAKIP	BB (70,05)
	Evaluasi dan Humas	2. Indeks	Indeks Layanan Publik	А
		3.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	81 (Baik)
		4.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,8
		5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80
		1		

Kegiatan Anggaran (Rp):

Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama, dan Humas 6.772.217.000

Tabel 2.5 Revisi ke-2 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		
(1)	(1) (2)		(3)		
Meningkatnya Layanan Perencanaan, Kerja Sama,		1.	Kategori Nilai SAKIP	BB (70,05)	
	Evaluasi dan Humas	2.	Indeks Layanan Publik	A (93)	
		3.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	81 (Baik)	
		4.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3.8	
		5.	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	80	

Kegiatan

Anggaran (Rp):

Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama, dan Humas 6.291.642.000

2.4 Rencana Aksi atas Penetapan Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi merupakan rencana pelaksanaan perjanjian kinerja tiap program/kegiatan/keluaran pada setiap Triwulan disertai dengan sasaran dan tolak ukurnya. Penetapan Rencana Aksi yaitu terhadap indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja. Adapun Rencana Aksi Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 pada setiap Triwulan sebagaimana terlampir yaitu:

Tabel 2.6 Rencana Aksi Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023

NO.	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI			
NO.	KEGIATAN	KEGIATAN	KINERJA	IAKGEI	TRIWULAN	TRIWULAN	TRIWULAN	TRIWULAN
			·		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pelayanan	Meningkatn	Kategori Nilai	BB	Menginvetarisir	Menghimpun	Menyusun	Penyusunan dan
	Perencanaa	ya Layanan	SAKIP	(70,05)	kebutuhan data	data atau	laporan	penyampaian
	n,	Perencanaa			atau	dokumentasi	Semester I,	LaporanKinerja
	Pemantauan	n,			dokumen dan	pendukung	menindaklanju	ANRI Triwulan
	dan	Pemantaua			menyusun		ti rekomendasi	III Tahun 2023,
	Evaluasi,	n dan			laporan tahun		hasil evaluasi	persiapan
	Kerja Sama	Evaluasi,			2022		internal SAKIP	penyusunan
	danHumas	Kerja Sama					Sekretariat	LaporanKinerja
		danHumas					Utama,	Tahun 2023,
							melaksanakan	dan
							evaluasi	memperoleh
							atas	Kategori Nilai
							implementasi	SAKIP "BB"
							SAKIPtahun	
							2022 yang	

			Indeks	A	Menginv	Menyusun	dilakukan Tim Evaluator KemenPANRB dan persiapan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Meningkatkan	Melakukan
			Layanan Publik		entarisir dokumen yang dibutuhka n dalam layanan publik	dan menyemp urnakan kuesioner sebagai bahan survei	layanan public dan Melaksanakan survey kepuasan layanan publik	pengolahan data dan mencapai target indeks layanan publik "A"
			Indeks Perencanaan Pembanguna n Nasional (IPPN)	81 (Baik)	Menginventa risir dokumen- dokumen perencanaan dan anggaran ANRI, yaitu: Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); serta Rencana Kerja danAnggaran (RKA)	Menganalisa kesesuaian antara: Renstra ANRI denganRPJMN; Renstra ANRI denganRenja ANRI; Renja ANRI denganRKP; RKA ANRI dengan Pagu Alokasi ANRI; RKA ANRI dalam mendanai KRO-RO; serta pencapaian targetRenstra dan Renja.	Menyusun rancangan laporan pelaksanaan indeks Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Analisa yang dilakukan pada Triwulan II.	Menyampaikan laporan pelaksanaan indeksi Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk mendapatkan penilaian dan mencapai target "81"
NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA A	AKSI TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,8	Menginventaris ir dokumen- dokumen yang terkait dengan layanan kunjungan ke diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dan Keterbukaan Informasi Publik, antara	Menganalisa kinerja layanan kunjungan ke diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dan Keterbukaan Informasi Publik	Menyusun rancangan laporan kinerja kunjungan ke diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dan Keterbukaan Informasi Publik	Menyampaikan laporan kinerja kunjungan ke DioramaSejarah Perjalanan Bangsa dan Keterbukaan Informasi Publik dan mencapai target "3,8"

			lain standar pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, website, digitalisasi pelayanan, konsultasi dan pengaduan, inovasi layanan.			
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80	Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan, serta menetapkan jumlah responden dan waktu pengumpulan data	Melaksanaka n Survei Kepuasan Masyarakat serta melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan hasil survei	Menyampaika n laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakatdan mencapai target "80"

2.5 Rencana Penarikan Dana

Rencana Penarikan Dana Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Pada Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	PAGU REVISI	RENCA	NA PENARIKAI	N DANA PER TE	RIWULAN
	REGIATAN	AWAL (Rp)	(Rp)	I	II	III	IV
3615	Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerjasama, dan Humas	6,922,217,000	6,291,642,000	884.692.396	1.997.065.631	2.032.882.827	1.377.001.146
3615.EBA	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,392,334,000	4,258,969,000	636.130.374	1.749.351.466	1.366.986.277	506.500.883

3615.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,529,883,000	2,032,673,000	248.562.022	247.714.165	665.896.550	870.500.263
----------	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2.6 Metode Pengukuran (Pedoman Pengukuran pada Per ANRI No.3 Tahun 2022)

Metode pengukuran tiap indikator kinerja yang ada di Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat terhadap indikator kinerja tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Metode Pengukuran terhadap Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Metode Pengukuran	Penanggung Jawab
Kategori Nilai SAKIP	BB (70,05)	Hasil penilaian dan evaluasi Kementerian PANRB.	Biro Perencanaan dan Humas
Indeks Layanan Publik	A (93)	Survei kepuasan pengunjung layanan publik Sekretariat Utama	Biro Perencanaan dan Humas
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	81 (Baik)	Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PPN/ BAPPENAS.	Biro Perencanaan dan Humas
Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,8	Survei kepuasan pengunjung layanan publik Sekretariat Utama	Biro Perencanaan dan Humas
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80	Melakukan Pengolahan data dan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Utama Berdasarkan PerMenpan 14/2017	Biro Perencanan dan Humas

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pemantauan pelaksanaan pencapaian kegiatan Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dilakukan untuk mendapatkan perkembangan capaian kegiatan. Pengukuran dilakukan untuk membandingkan antara rencana aksi tahun 2023 yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2023. Adapun realisasi kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		ndikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kegiatan	%
Meningkatnya	1.	Kategori Nilai SAKIP	BB	В	98,77
Layanan			(70,05)	(69,19)	
Perencanaan,	2.	Indeks Layanan Publik	Α	Α	102,15
Kerja Sama,			(93)	(95)	
Evaluasi dan	3.	Indeks Perencanaan	81	96,34	118,94
Humas		Pembangunan Nasional	(Baik)	(Sangat Baik)	
		(IPPN)			
	4.	Indeks Kualitas Pelayanan	3,8	3,899	102,6
		Publik			
	5.	Nilai Survei Kepuasan	80	Α	121,83
		Masyarakat		(97,47)	

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Katagori Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap kementerian/lembaga menerapkan SAKIP. SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dalam rangka menciptakan sebuah siklus perencanaan dan pertanggungjawaban sebagai penguatan akuntabilitas

kinerja ANRI. Berikut kami sampaikan perbandingan rincian penilaian yang diterima tahun 2022-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nilai SAKIP ANRI Tahun 2022-2023

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Kenaikan dan Penurunan
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,90	22,12	0,22
2.	Pengukuran Kinerja	25	18,15	18,44	0,29
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,64	9,24	(0,4)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna	10	19,20	19,39	0,19
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,89	69,19	0,3
	Tingkat Akuntabilitas Kiner	ia	В	В	

Penilaian hasil evaluasi SAKIP ANRI pada tabel 3.3 berdasarkan Surat Kementerian PAN RB Nomor: B/115/AA. 05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar 69,19. Jika dibandingkan nilai sakip ANRI tahun 2022 sebesar 68,89 dengan nilai sakip ANRI tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,3 Poin.

3.1.2 Indeks Layanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan survey kepuasan pengunjung layanan publik pada penyelenggaran Pelayanan Publik PPID dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa diperoleh hasil Skor Kepuasan Masyarakat

(SKM) 97,47 dan mutu pelayanan A kategori Sangat Baik. Sedangkan Indeks Layanan Publik tahun 2023 adalah sebesar 95.

Tabel 3.3 Indeks Layanan Publik tahun 2022 -2023

	Target		Realisasi/Indeks		Realisasi (%)	
Tahun	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Indeks Layanan Publik	Α	A (93)	A (3,67)	A (95)	100	102
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		80	88,25	A (97,47)	100	121,8

3.1.3 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka telah dimandatkan penerapan penilaian Kualitas Perencanaan menjadi salah satu hasil dan output yang diharapkan dalam pelaksanaan RB seluruh K/L/D level meso guna mengukur kualitas perencanaan yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah. Dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General sebagaimana Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Indeks Pengukuran Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasiskan dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.

Hasil penilaian evalusi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2023 berdasarkan Surat Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor: 01568/SES/PP.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 Hal: Penyampaian Informasi

Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperoleh nilai sebesar 96,34 dengan kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.4 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi/Indeks	Realisasi (%)
Indeks Perencanaan	81	96,34	118,94
Pembangunan Nasional (IPPN)	(Baik)	(Sangat Baik)	

3.1.4 Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penilaian mandiri tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik tahun 2023 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperoleh nilai 3,899 dengan kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.5 Indeks Kualitas Pelayanan Publik tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi/Indeks	Realisasi (%)
Indeks Kualitas Layanan Publik	3,8	3,899	102,6

3.1.5 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada ANRI oleh Biro Perencanaan dan Humas sebagai unit koordinator pelaksanaan layanan publik di lingkungan ANRI sebagaimana Keputusan Kepala ANRI Nomor 283 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di lingkungan ANRI Keputusan Kepala ANRI Nomor 325 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik ANRI Tahun 2023 – 2024. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara daring yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM ANRI yaitu:

- 1. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. (U1)
- 2. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. (U2)
- 3. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. (U3)
- 4. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. (U4)
- 5. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. (U5)
- Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. (U6)
- 7. Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. (U7)
- 8. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). (U8)
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
 (U9)

Pada survei kepuasan layanan informasi publik, unsur pelayanan pada layanan layanan informasi publik terdiri dari 9 unsur layanan. Dengan demikian besaran nilai tertimbang untuk survei tersebut adalah 0,111. Dalam mengukur Indeks Survei

Kepuasan Masyarakat layanan informasi publik tahun 2023, berikut adalah perhitungan terhadap hasil olahan yang dingunakan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3.6 Detail Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik Tahun 2023

UNSUR LAYANANn	NILAI PERSEPSI	NILAI PERSEPSI TIAP UNSUR DIKALI NILAI TERTIMBANG =0,111
Prosedur	3,947	0,4382
Persyaratan	3,947	0,4382
Kompetensi pelaksana	3,916	0,4347
Perilaku pelaksana	3,938	0,4371
Waktu	3,868	0,4294
Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,895	0,4323
Biaya	3,947	0,4382
Sarana dan prasarana	3,912	0,4343
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,754	0,4167
	JUMLAH (Nilai Indeks)	3,899

Maka, nilai SKM layanan informasi publik setelah di konversi adalah:

SKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar (25)

 $= 3,899 \times 25$

= 97,47

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2023, dapat disimpulkan pelaksanaan pelayanan publik di ANRI, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 97,47 dan mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO)
Tahun 2023

KODE	Uraian KRO/RO	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% REALISASI ANGGARAN	REALISASI FISIK	% REALISASI FISIK
3615.EBA	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Layanan	4,258,969,000	4,242,057,820	99.60	2 Layanan	100
3615.EBA.001	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama	1 Layanan	1,484,221,000	1,480,193,921	99.73	1 Layanan	100
3615.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	2,774,748,000	2,761,863,899	99.54	1 Layanan	100
3615.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	23 Dokumen	2,032,673,000	2,020,176,033	99.39	26 Dokumen	113,04
3615.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9 Dokumen	1,404,986,000	1,402,270,299	99.81	9 Dokumen	100
3615.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14 Dokumen	627,687,000	617,905,734	98.44	17 Dokumen	121,43

Adapun Capaian Klasifikasi Rincian Output (KRO) Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 berdasarkan realisasi fisiknya, dari masing-masing capaian Rincian Output sebagai berikut:

- 3615.EBA.001 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama tahun 2023 telah sesuai dengan target raelisasi 1 Layanan dengan presentase sebesar 100%.
- 3615.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat tahun 2023 telah sesuai dengan target raelisasi 1 Layanan dengan presentase sebesar 100%.
- 3615.EBD.952 Layanan Hubungan Masyarakat tahun 2023 telah sesuai dengan target raelisasi 9 Dokumen dengan presentase sebesar 100%.
- 3615.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada tahun 2023 telah tercapai realisasi fisik 17 Dokumen dengan presentase sebesar 121,43% melebihi dari target realisasi 14 Dokumen.

Capaian rata-rata Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 105,3%.

3.2 Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran yang sudah direalisasikan berdasarkan Rincian Output (RO) Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
KODE		(Rp)	(Rp)	(%)	
3615	Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerjasama, Humas dan Tata Usaha Pimpinan	6,291,642,000	6,262,233,853	99.53	
3615.EBA	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,258,969,000	4,242,057,820	99.60	
3615.EBA.001	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama	1,484,221,000	1,480,193,921	99.73	
3615.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	2,774,748,000	2,761,863,899	99.54	
3615.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,032,673,000	2,020,176,033	99.39	
3615.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,404,986,000	1,402,270,299	99.81	
3615.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	627,687,000	617,905,734	98.44	

Persentase penyerapan anggaran Rincian Output (RO) Kegiatan Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp6,262,233,853 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) atau dengan presentase sebesar 99,53% dari pagu

anggaran. Uraian realisasi penyerapan anggaran pada setiap Rincian Output (RO) adalah sebagai berikut:

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama Penyerapan anggaran Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama pada tahun 2023 sebesar Rp1,480,193,921 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau dengan presentase sebesar 99,73%, dari pagu anggaran sebesar Rp1,484,221,000 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp4,027,079 (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 0,27% yang belum terserap. Penyerapan anggaran pada Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama sudah baik, terlihat dari capaian presentasi sebesar 99,73%.

2. Layanan Hubungan Masyarakat

Penyerapan anggaran Layanan Hubungan Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp2,761,863,899 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau dengan presentase sebesar 99,54% dari pagu anggaran sebesar Rp2,774,748,000 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus emat puluh delapan ribu rupiah). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp12,884,101 (dua belas juta delapan ratus delapan empat ribu seratus satu rupiah) atau sebesar 0,46% yang belum terserap. Penyerapan anggaran Layanan Hubungan Masyarakat sudah baik, ini ditunjukkan dengan presentase penyerapan anggaran sebesar 99,54%.

3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Penyerapan anggaran Layanan Hubungan Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp1,402,270,299 (satu milyar empat ratus dua juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau dengan presentase sebesar

99,81% dari pagu anggaran sebesar Rp1,404,986,000 (satu milyar empat ratus empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp2,715,701 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus satu rupiah) atau sebesar 0,19% yang belum terserap. Penyerapan anggaran Layanan Perencanaan dan Penganggaran sudah baik, ini ditunjukkan dengan presentase penyerapan anggaran sebesar 99,81%.

4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Penyerapan anggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada tahun 2023 sebesar Rp617,905,734 (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau dengan presentase sebesar 98,44%, dari pagu anggaran sebesar Rp627,687,000 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp9,781,266 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 1,56% yang belum terserap. Penyerapan anggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi sudah baik, ini ditunjukkan dengan presentase penyerapan anggaran Layanan dan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp 98,44%.

Pelaksanaan capaian RO (Rincian Output) Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri
 - Pada komponen Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 136,001,680 dengan presentase sebesar 98.87% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp137,560,000. Adapun realisasi anggaran kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp17,321,900 dengan presentase sebesar 99.90%.

- b. Penyusunan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp44,550,000 dengan presentase sebesar 97.38%.
- c. Pembahasan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp72,029,780 dengan presentase sebesar 99.53%.
- d. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp2,100,000 dengan presentase sebesar 100%.

2. Kerja Sama Multilateral di Bidang Kearsipan

Pada komponen Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1,181,314,247 dengan presentase sebesar 99.79% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp1,183,765,000. Adapun realisasi anggaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp53,200,000 dengan presentase sebesar 99.92%
- b. Penyusunan Naskah Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp55,950,000 dengan presentase sebesar 100%.
- c. Pembahasan Naskah Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp217,676,895 dengan presentase sebesar 99.72%.
- d. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp4,442,000 dengan presentase sebesar 98.71%.
- e. Penyelenggaraan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp161,278,861 dengan presentase sebesar 99.91%.

- f. Monitoring dan Evaluasi Keanggotaan ANRI pada Organisasi Internasional Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp59,001,000 dengan presentase sebesar 98.35%
- g. Penyelenggaraan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp67,083,381 dengan presentase sebesar 99.33%
- h. Penyelenggaraan Preliminary Meeting Forum Kerja Sama Arsip Nasional Negara-Negara Islam Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp562,682,110 dengan presentase sebesar 99.97%.

Hambatan dan Tindak Lanjut

- Keterbatasan sumber daya manusia di Kelompok Substansi Kerja Sama, dilakukan tindak lanjut dengan pengajuan tambahan sumber daya manusia di Kelompok Substansi Kerja Sama;
- Respon yang lambat dari pihak mitra ataupun unit kerja pengampu kegiatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dilakukan tindak lanjut dengan koordinasi secara intens dengan pihak mitra ataupun unit kerja pengampu kegiatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Pelaksanaan capaian RO (Rincian Output) Layanan Perencanaan dan Penganggaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program
 - Pada komponen Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp861.118.850 dengan presentase sebesar 99,76% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp863.225.000. Adapun realisasi anggaran kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ANRI Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp146.130.703 dengan presentase sebesar 99,83%.

- b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp85.262.000 dengan presentase sebesar 100%.
- c. Koordinasi Perencanaan telah terealisasi anggaran sebesar Rp450.331.147 dengan presentase sebesar 99,63%.
- d. Penyusunan IKU ANRI telah terealisasi sebesar Rp179.395.000 dengan presentase sebesar 99,89%.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran

Pada komponen Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp541.151.449 dengan presentase sebesar 99,89% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp541,761,000. Adapun realisasi fisik anggaran sebagai berikut:

- a. Penyusunan SPHSPB ANRI Tahun 2024 telah terealisasi sejumlah Rp3.942.200 dengan presentase sebesar 99,89%.
- b. Penyusunan Dokumen Revisi Anggaran 2023 telah terealisasi sejumlah Rp20.875.800 dengan presentase sebesar 99,98%.
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ANRI telah terealisasi sejumlah Rp516.333.449 dengan presentase sebesar 99,88%.

Hambatan dan Tindak Lanjut:

Sinkronisasi Rencana Kerja ANRI Tahun Anggaran 2024 antara Renja-KRISNA yang dikelola oleh BAPPENAS dan RKA-SAKTI yang dikelola oleh Kementerian Keuangan tidak dapat dilakukan, hal ini berdampak atas pagu yang tertera pada KRISNA-Renja tidak sama dengan yang di RKA-SAKTI, dilakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan mitra kerja di BAPPENAS agar dapat dilakukan sinkronisasi antara RKA-SAKTI dengan Renja-KRISNA, agar pagu yang terdapat dalam SAKTI sama dengan pagu yang terdapat dalam Renja-KRISNA; Terdapat usulan penambahan belanja gaji pegawai TA 2023 kepada BA BUN yang belum dilengkapi data dukung sesuai persyaratan, dilakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk melengkapi data dukung pada proses revisi anggaran

Pelaksanaan capaian RO (Rincian Output) Layanan Hubungan Masyarakat pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Publikasi melalui Media Cetak dan Media Rekam.

Pada komponen Publikasi melalui Media Cetak dan Media Rekam pada tahun 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp470.736.204 dengan presentase sebesar 98,94% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp475.789.000. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:

- Spanduk : 6 buah

- Baliho : 11 buah

- Fasilitasi Desain : 146 desain flyer

- Majalah Arsip Edisi 83 sudah dicetak dan proses diseminasi

- Penyusunan Buku Kelembagaan sudah dilaksanakan pencetakan.

2. Dokumentasi Peliputan.

Pada komponen Dokumentasi Peliputan pada tahun 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp88.964.880 dengan presentase sebesar 95,41% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp93.242.000. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:

- Dokumentasi Foto: 178 foto

- Dokumentasi Video : 103 video

- Editing Video Kelembagaan: 37 video

3. Publikasi melalui kegiatan tertentu.

Pada komponen Publikasi melalui kegiatan tertentu pada tahun 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp6.525.600 dengan presentase sebesar 99,78% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.540.000. Adapun realisasi fisik kegiatan antara lain digunakan untuk memenuhi kegiatan diseminasi informasi kelembagaan dalam bentuk rapat-rapat dan

pengambilan/produksi bahan visual yang dapat ditayangkan pada media sosial.

- 4. Peningkatan Citra melalui Pengelolaan Website/Portal ANRI dan Media Sosial. Pada komponen Peningkatan Citra melalui Pengelolaan Website/Portal ANRI dan Media Sosial pada tahun 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp96.770.000 dengan presentase sebesar 100%. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:
 - Rapat Pengembangan Website Kelembagaan
 - Pengelolaan Website ANRI Bulan Januari s.d. Desember Tahun Anggaran
 2023
 - Jumlah pelaksanaan program diseminasi informasi kelembagaan pada media sosial unggahan per Desember 2023:

Facebook : 494 unggahan
Instagram : 500 unggahan
Twitter : 1.100 cuitan
Tiktok : 428 unggahan
Youtube : 95 unggahan

- Tilik Memori : 12 edisi

- Arsip Hari Ini : 337 konten

- YBY : 1 konten

5. Pelayanan Informasi Publik

Pada komponen Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp36.794.035 dengan presentase sebesar 98,91 % dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp37.200.000. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan seminar kit kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi Publik di lingkungan ANRI Tahun 2023.
- Pengelolaan Layanan Informasi Publik bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dengan jumlah 171 permohonan informasi.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi Publik Tahun 2023.

- 6. Layanan Penerimaan Kunjungan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Pada komponen Layanan Penerimaan Kunjungan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa pada tahun 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2.800.000 dengan presentase sebesar 100%. Adapun realisasi kegiatan antara lain pengelolaan layanan kunjungan Diorama Sejarah Bangsa bulan Januari s.d. Desember 2023 dengan jumlah 151 instansi/institusi.
- 7. Pengelolaan Hubungan antar Lembaga dan Media Pada komponen Pengelolaan Hubungan antar Lembaga dan Media pada tahun 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2.059.273.180 dengan presentase sebesar 99,85% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.062.407.000. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:
 - Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan siaran pers sejumlah 8 kali.
 - Kunjungan Kelembagaan: 198 Instansi
 - Layanan magang/prakerin: 413 siswa
 - Layanan permohonan penelitian: 61 permohonan
 - Diseminasi Informasi Internal : 117 kali
 - Dukungan Kehumasan Luring: 40 kegiatan
 - Dukungan kehumasan (zoom) apel pagi: 39 kegiatan
 - Dukungan kehumasan (zoom) unit kerja: 34 Kegiatan
 - Dukungan Hybrid: 30 kegiatan
 - Keikutsertaan Kegiatan Bakohumas: 12 kegiatan
 - Lelang Penyedia Jasa EO Peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun
 2023
 - Evaluasi terkait Peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 antara
 ANRI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi.
 - Pelaksanaan Audiensi dan Survei Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2024 di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Hambatan dan Tindak Lanjut:

- Terdapat kegiatan yang bersifat insidental berdasarkan arahan Pimpinan sehingga masa persiapan dari unit kerja yang difasilitasi sangat singkat dan keterbatasan fasilitas sumber daya, dilakukan tindak lanjut dengan meningkatkan koordinasi secara insentif antara Tim Humas dengan unit yang difasilitasi.
- Tingginya frekuensi kegiatan khususnya yang bersifat rutin seperti penerimaan kunjungan kelembagaan, penerimaan magang, dan penumpukan permintaan fasitasi kegiatan dari unit kerja substantif, dilakukan tindak lanjut dengan mengoptimalkan pencatatan pembagian tugas sehingga beban merata.
- Koordinasi antar pokja dan penumpukan beban kerja anggota pokja (mengerjakan lebih dari 1 tugas dalam satu waktu), dilakukan tindak lanjut dengan meningkatkan kualitas koordinasi antar pokja.

Pelaksanaan capaian RO (Rincian Output) Layanan Pemantauan dan Evaluasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan

Pada komponen Penyusunan Laporan pada tahun 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp393,452,201 dengan presentase sebesar 99.18% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp396,704,000. Adapun realisasi fisik dan realisasi anggaran sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Kinerja telah terealisasi sejumlah Rp 66,887,112 dengan presentase sebesar 97.09%. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:
 - Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022
 Level Lembaga (ANRI),
 - Laporan Kinerja Tahun 2022 Level Es.I (Sekretariat Utama)
 - Laporan Kinerja Level Lembaga (ANRI) TA.2023 Triwulan I,
 Laporan Triwulan II (Semester I) dan Laporan Triwulan III
 ANRI.;

- b. Penyusunan Laporan Tahunan ANRI telah terealisasi sejumlah Rp7,975,000 dengan presentase sebesar 98.46%. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:
 - Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Tahunan ANRI Tahun 2022;
- c. Penyusunan Laporan kepada DPR telah terealisasi sejumlah Rp70,907,692 dengan presentase sebesar 99.82%. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:
 - Telah tersusunnya Laporan kepada DPR sejumlah 4 (empat) Laporan
- d. Penyusunan Laporan Pemantauan RO Pendukung RKP telah terealisasi sejumlah R155,998,500 dengan presentase sebesar 99.86%. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:
 - Telah tersusunnya Laporan Monev RKP Prioritas Nasional (PN)
 Triwulan IV Tahun 2022,
 - Laporan Monev RKP Triwulan I, II dan Triwulan III Tahun 2023.
- e. Penyusunan Laporan Triwulan telah terealisasi sejumlah Rp83,107,297 dengan presentase sebesar 99.09%. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:
 - Telah tersusunnya Laporan Triwulan IV Tahun 2022 Level Es.I (Sekretariat Utama),
 - Laporan Triwulan IV Tahun 2022 level Biro Perencanaan dan Humas,
 - Laporan Triwulan IV ANRI Tahun 2022 (Level K/L),
 - Laporan Triwulan I, Triwulan II (Semester I ANRI Tahun 2023)
 dan Triwulan III Tahun 2023 Level Lembaga (ANRI);
- f. Penyusunan Laporan Lainnya telah terealisasi sejumlah Rp8,576,600 dengan presentase sebesar 99.89%. Adapun realisasi fisik kegiatan sebagai berikut:
 - Tersusunnya Laporan Kinerja kepada Presiden dan Laporan Bahan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI untuk disampaikan ke

Bappenas dan Laporan Sumbangan Narasi himpunan RKAKL 2024 ke DJA:

2. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja

Pada komponen Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja pada tahun 2023 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp224,453,533 dengan presentase sebesar 97.17% dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp230,983,000. Adapun realisasi fisik anggaran sebagai berikut:

- a. Persiapan Evaluasi Kinerja Internal telah terealisasi sejumlah Rp405,000 dengan presentase sebesar 100%.
- b. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Internal telah terealisasi sejumlah Rp224,048,533 dengan presentase sebesar 97.17%.

Hambatan dan Tindak Lanjut:

- Masih banyaknya unit kerja yang masih belum memahami dalam melakukan penyusunan Laporan Triwulan maupun Laporan Kinerja, dilakukan tindaklanjut dengan mengadakan Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan Laporan Triwulanan agar unit kerja bisa memahami dalam penyusunan Laporan Triwulanan;
- Data yang disampaikan oleh unit kerja untuk bahan penyusunan laporan masih banyak yang belum *valid*, dilakukan tindak lanjut dengan melakukan konfirmasi ulang dan memastikan data yang disampaikan sudah *valid*.

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Secara umum, pencapaian target Biro Perencanaan dan Humas pada Tahun 2023 telah sesuai dengan yang ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2023 telah dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaan terdapat kendala atau hambatan seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya. Tingkat penyerapan anggaran kegiatan Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp6,262,233,853 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) atau 99,53% dari total pagu sebesar Rp6,291,642,000 (enam milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

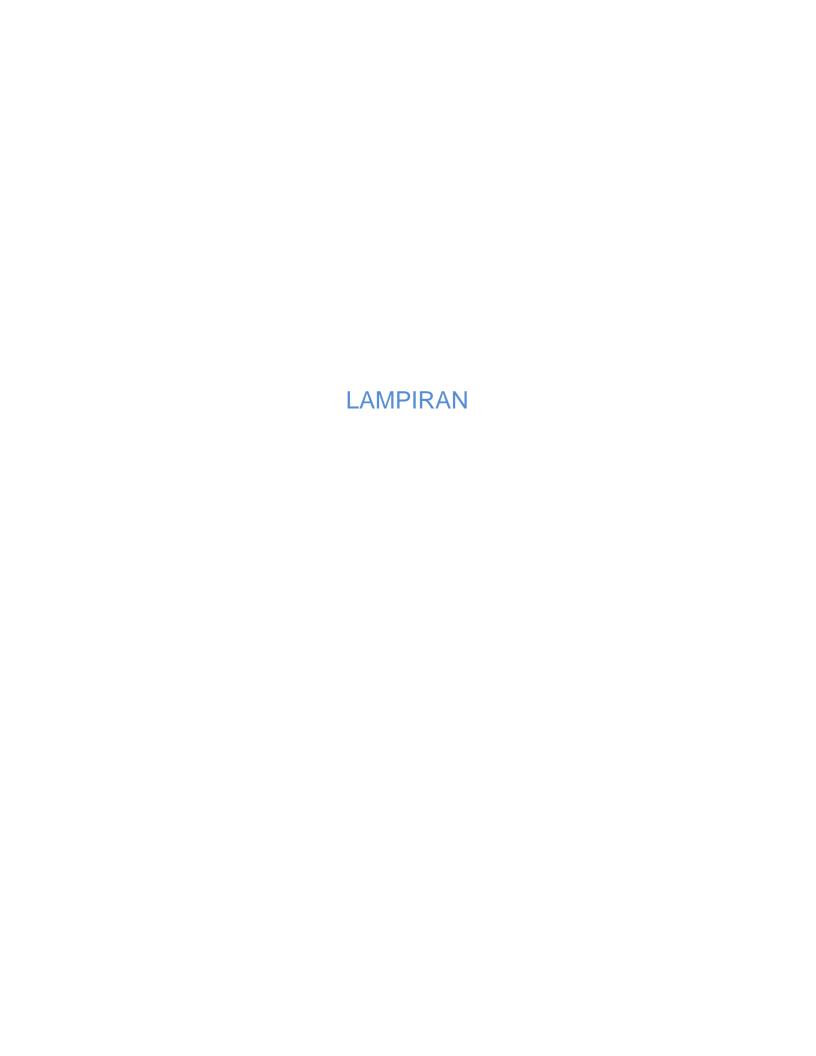
2. SARAN

Kerjasama antar unit kerja di lingkungan internal Arsip Nasional Republik Indonesia adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai organisasi yang tumbuh dan berkembang.

Demikian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat ini disusun sebagai instrumen *monitoring* kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang agar semua kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, maka diharapkan terpenuhinya jumlah SDM yang kompeten dan komitmen terhadap tugas, peralatan dan anggaran yang memadai, serta koordinasi yang baik dengan internal dan eskternal serta koordinasi dengan *stake holder*, mitra dan unit kerja terkait.

Jakarta, 12 Februari 2024 Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat,

Florentinus Kristiartono





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Florentinus Kristiartono, MM.

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rini Agustiani, SH. MAP.

Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rini Agustiani, SH. MAP.

Jakarta, 19 Desember 2022

Pihák Pertama,

Drs. Florentinus Kristiartono, MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Kerja Sama,	1.	Kategori Nilai SAKIP	BB (70,05)
	Evaluasi dan Humas	2.	Indeks Layanan Publik	A

Kegiatan

Anggaran (Rp):

Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama, dan Humas 6.922.217.000

Sekretaris Utama

(Rini Agustiani, SH. MAP.)

Jakarta, 19 Desember 2022

Kepala Biro Perencanaan dan Humas

(Drs Florentinus Kristiartono, MM)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 **REVISI KE-1**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs. Florentinus Kristiartono, MM.

Jabatan

: Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Rini Agustiani, SH. MAP.

Jabatan

: Sekretaris Utama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rini Agustiani, SH. MAP.

Jakarta, 26 Juni 2023

Florentinus Kristiartono, MM.

Bak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan	型 動	Target	
(1)	(2)	500 81003	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Kerja Sama,	1.	Kategori Nilai SAKIP	BB (70,05)
	Evaluasi dan Humas	2.	Indeks Layanan Publik	A
		3.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	81 (Baik)
		4.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,8
		5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80

Kegiatan

Anggaran (Rp):

Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama, dan Humas

6.772.217.000

Sekretaris Utama

(Rini Agustiani, SH. MAP.)

Jakarta, 26 Juni 2023

Kepala Bro Perencanaan dan Humas

rentinus Kristiartono, MM)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI KE-2

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Florentinus Kristiartono, MM.

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rini Agustiani, SH. MAP.

Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 November 2023

ak Pertama,

Rini Agustiani, SH. MAP.

Pihak Kedua,

Drs. Florentinus Kristiartono, MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
(1)	(2)		(3)					
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Kerja Sama,	1.	Kategori Nilai SAKIP	BB (70,05)				
	Evaluasi dan Humas	2.	Indeks Layanan Publik	A (93)				
		3.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	81 (Baik)				
		4.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3.8				
		5.	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	80				

Kegiatan

Anggaran (Rp):

Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

6.291.642.000

Kerjasama, dan Humas

Sekretaris Utama

Rimmy.

(Rini Agustiani, SH. MAP.)

Jakarta, 01 November 2023

Kepala Birg Perencanaan dan Humas

(Drs. Florentinus Kristiartono, MM)

2.1. Rencana Kinerja Tahunan Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR/ TARGET/ SA		KLASIFIKASI F OUTPUT (KRO INDIKATOR/TA SATUAN)/	RINCIAN OUTF INDIKATOR/TA SATUAN		ALOKASI ANGGARA N (Rp000)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dukungan Manajemen	Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama, dan Humas	lay anan Perencanaa n, Kerja Sama dan Evaluasi dan Humas Indikator Kinerja	BB (70,05) A	1 Layanan Dukungan Manajemen Internal Indikator KRO: Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik	4 Indeks	1 Layanan Hubungan Masyarakat pada Unit Kerjasama Indikator RO: Jumlah layanan kerja sama	1 Layanan	1.019.642	
		Kegiatan: - Kategori Nilai SAKIP - Indeks Layanan Publik				2 Layanan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Indikator RO: Jumlah layanan hubungan masyarakat	1 Layanan	3.372.692	

PROGRAM	KEGIATAN	SASAF KEGIAT INDIKAT TARG SATU	TAN/ TOR/ SET/	KLASIFIKASI OUTPUT (I INDIKATOR/I SATUA	KRO)/ TARGET/	RINCIAN OUTF INDIKATOR/T SATUA	ARĠET/	ALOKASI ANGGARA N (Rp000)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1 Layanan Manajemen Kinerja Internal Indikator KRO: Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal pada ANRI	25 Dokumen	1Layanan Perencanaan dan Penganggaran Indikator RO: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	9 Dokumen	1.701.820	
						1Layanan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator KRO: Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi	14 Dokumen	828.063	
				TOTAL				6.922.217	





LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN **RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN**

2023 **DESEMBER**



#450448

ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

DESEMBER (KUMULATIF)

Tahun :2023

K/L :087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UK. Eselon I :01 - Arsip Nasional

UK. Eselon II :02 - Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

			STATUS PELAKSANAAN		:ISIK					ANGGARAN			PERM	IASALAHAN
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	FISIK Riil	Alokasi	Real.	%	Status Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
3615	.EBA.001 - Layanan Hubunga	an Masyarakat dan	ı Informasi pada Unit Kerja Sama											
1	053 Kontribusi Keanggotaan ANRI di Organisasi Kearsipan Internasional	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan	100.00	Laporan	1	1		162,896,000	162,877,994	99.99%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan
2	052 Kerja Sama Luar Negeri	Pelaksanaan	1. Telah dilaksanakan Penjajakan Kerja Sama ANRI - NAP 2. Telah dilaksanakan Penyusunan Working Plan ANRI - NAN 3. Telah dilaksanakan Pembahasan Implementasi Kerja Sama ANRI - Leiden University 4. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Kearsipan Bilateral 5. Kehadiran ANRI pada SARBICA GC, EBM dan Symposium 2023 6. Telah dilaksanakan Monitoring partisipasi ANRI di kegiatan organisasi internasional	99.99	Layanan	1	1		1,183,765,000	1,113,508,000	94.06%	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan	Lambatnya respon mitra dan unit kerja
3	051 Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri	Pelaksanaan	1. Telah dilaksanakan Penjajakan Kerja Sama ANRI - PFN 2. Telah dilaksanakan Penyusunan MOU ANRI Universitas Teuku Umar 3. Telah dilaksanakan Pembahasan Kerja Sama ANRI UIN Arraniry 4. Telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Kerja Sama Kearsipan Dalam Negeri	99.99	Layanan	1	1		137,560,000	136,001,680	98.87%	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	Lambatnya respon mitra dan unit kerja

3615.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

			STATUS PELAKSANAAN			FISIK				ANGGARAN			PER	MASALAHAN
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	FISIK Riil	Alokasi	Real.	%	Status Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
4	053 Publikasi melalui Kegiatan Tertentu	Selesai	Telah dilaksanakan Penyiapan bahan publikasi untuk kebutuhan publikasi daring pada Bulan Desember	100.00	Dokumen	1	1		6,540,000	5,246,600	80.22%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan
5	054 Peningkatan Citra melalui Pengelolaan Website/Portal ANRI dan Media Sosial	Selesai	Telah dilaksanakan Pengelolaan website ANRI Bulan Desember 2. Telah dilaksankan Pengelolaan media sosial ANRI Bulan Desember	100.00	Dokumen	1	1		96,770,000	96,770,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan
6	051 Publikasi Melalui Media Cetak dan Media Rekam	Pelaksanaan	Telah dilakukan Pencetakan 3 baliho kelembagaan untuk momen Bulan Desember 2. Telah dilakukan Pencetakan Majalah Arsip edisi 84 3. Telah dilakukan Pencetakan Buku Kelembagaan	99.99	Dokumen	1	1		475,789,000	470,736,204	98.94%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan
7	052 Dokumentasi dan Peliputan	Selesai	Telah dilaksanakan Dokumentasi kegiatan kelembagaan Bulan Desember	100.00	Dokumen	1	1		93,242,000	88,964,880	95.41%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan
8	055 Pelayanan Informasi Publik	Selesai	Telah dilakukan Penyusunan laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 2. Telah dilaksanakan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Bulan Desember	100.00	Dokumen	1	1		37,200,000	36,794,035	98.91%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan
9	056 Layanan Penerimaan Kunjungan Diorama Sejarah Bangsa	Selesai	Telah dilaksanakan Pengelolaan Layanan Kunjungan Diorama SPB Bulan Desember	100.00	Dokumen	1	1		2,800,000	2,800,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan
10	057 Pengelolaan Hubungan Antar Lembaga dan Media	Selesai	Telah dilaksanakan Diseminasi informasi kelembagaan pada media Bulan Desember 2. Telah dilakukan Fasilitasi dukungan kehumasan pada kegiatan kelembagaan Bulan Desember 3. Partisipasi kegiatan pada Bakohumas Bulan Desember 4. Telah dilaksanakan Persiapan Rakornas Kearsipan Tahun 2024	100.00	Dokumen	1	1		2,062,407,000	2,059,273,180	99.85%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan

			STATUS PELAKSANAAN		:ISIK			FISIK		ANGGARAN			PERMASALAHAN	
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	FISIK Riil	Alokasi	Real.	%	Status Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
3615	.EBD.952 - Layanan Perencan	aan dan Pengang	ggaran											
11	052 Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	Selesai	1. Telah dilakukan revisi POK 23 2. Telah dilakukan revisi DIPA19 (kewenangan DIPb) 3. Telah dilakukan revisi POK 24 4. Telah dilakukan revisi POK 24 5. Telah dilakukan revisi POK 25 6. Telah dilakukan revisi POK 25 6. Telah dilakukan revisi POK 25 6. Telah dilakukan revisi POK 26 8. Telah dilakukan revisi POK 26 8. Telah dilakukan koordinasi atas penyusunan konsep DIPA ANRI TA 2024 dengan mitra DIA 9. Telah dilakukan koordinasi atas penganggaran urusan kearsipan di Provinsi Jawa Barat 10. Telah dilakukan penyusunan konsep POK ANRI 2024	100.00	Dokumen	5	5		545,361,000	541,151,449	99.23%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan

			STATUS PELAKSANAAN		FISIK			FISIK		ANGGARAN			PERM	1ASALAHAN
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	Status	Keterangan	Progres Satuan Vol. Real. Riil Alokasi Real. %	Status Kemanfaatan	Kategori	Keterangan							
12	051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program	Selesai	1. Telah dilaksanakan Rapat Halfday Sosialisasi Penyusunan Rancangan Awal Renja TA 2025 2. Telah dilaksankan Rapat Pembahasan Persiapan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 3. Telah dilaksanakan Rapat Lanjutan Pembahasan Persiapan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 4. Telah dilaksanakan Pembahasan draft RKT ANRI 2024 4. Melakukan Finalisasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ANRI 2024 5. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka persiapan perencanaan pembangunan TA 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Selatan dan Bekasi 6. Telah dilaksanakan Koordinasi perencanaan menghimpun isu strategis dan arah kebijakan di D.I Yogyakarta 7. Telah dilaksanakan Sinkronisasi urusan kinerja kearsipan atas materi pemutakhiran 8. Telah dilaksanakan Bimtek Penganggaran K/L TA 2023 9. Telah dilaksanakan Koordinasi Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Tarif PNBP 10. Telah dilakukan sinkronisasi perencanaan urusan kinerja kearsipan SIPD 11. Telah dilakukan verifikasi laporan implementasi perpres no. 34/2022	100.00	Dokumen	4	4		859,625,000	859,625,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan

3615.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi

			STATUS PELAKSANAAN		FISIK					ANGGARAN			PERM	IASALAHAN
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	FISIK Riil	Alokasi	Real.	%	Status Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
13	O52 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja	Selesai	1. Telah dilaksanakan Sinkronisasi Data Capaian pada aplikasi eMonev, Aplikasi Manajemen Kinerja Lembaga, Aplikasi SMART di Pusat Jasa Kearsipan 2. Telah dilakukan penyusunan Matriks Data s.d Triwulan IV Tahun 2023 3. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada capaian fisik dan anggaran kerja Eselon II dan Satker pada Aplikasi e-Monev Bappenas 4. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi isian unit kerja pada Aplikasi Manajemen Kinerja Lembaga 5. Telah dilakukan pendampingan dan bimbingan unit kerja untuk pengisian Aplikasi e-Monev dan Aplikasi Manejemen Kinerja Lembaga 6. Telah dilakukan penyusunan capaian dan evaluasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 s.d 2023 7. Telah dilakukan penyusunan Laporan capaian berkala bulan November dan Desember Tahun 2023 8. Telah dilakukan monitoring data capaian pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan 9. Telah dilakukan penyusunan Laporan Evaluasi capaian kinerja dan anggaran melalui Aplikasi Manajemen Kinerja Lembaga dan Aplikasi e-Monev Bappenas 10. Telah dilakukan perbaikan dan koreksi isian unit kerja Eselon II dalam isian capaian fisik dan anggaran dalam Aplikasi e-Monev dan Aplikasi Manajemen Kinerja Lembaga 11. Telah dilakukan monitoring capaian kinerja satker ANRI dan satker mandiri sampai dengan bulan Desember 2023	100.00	Dokumen		1		230,983,000	224,453,533	97.17%	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal), Cara / Metode Pelaksanaan	1. Kesulitan dalam memperoleh data yang valid untuk dijadikan bahan dalam menyusun evaluasi kinerja UKE I maupun UKE II 2. Pergantian operator Aplikasi e-Monev setiap tahun sehingga Tim Evaluasi harus memberikan pemahaman berupa Sosialiasi dan Bimtek kepada unit kerja Eselon II 3. Pemahaman yang kurang operator Aplikasi e-Monev, Aplikasi Manejemen Kinerja Lembaga dalam melaporkan capaian kinerja dan anggaran sehingga menyulitkan Tim Evaluasi Kinerja dalam memverifikasi data 4. Data Tarikan dari Aplikasi KRISNA berbeda dengan POK unit kerja dikarenakan tidak diupdate menyulitkan unit kerja dalam pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas 5. Tim Evaluasi dan Pelaporan tidak diberikan akses pada Aplikasi SAKTI

			STATUS PELAKSANAAN			FISIK			ANGGARAN				PERMASALAHAN	
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	Status	Keterangan	Progres Satuan Vol. Real. FISIK Riil Alokasi Real. %	%	Status Kemanfaatan	Kategori	Keterangan						
14	051 Penyusunan Laporan	Selesai	Telah dilakukan penyiapan dokumen dan data dukung dalam rangka penyusunan Konsep Laporan Kinerja 2. Telah dilakukan penyusunan konsep Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II 3. Telah dilakukan pembahasan hasil penilaian evaluasi kinerja ANRI tahun 2023 4. Menyiapkan dokumen dan data dukung dim rangka persiapan penyusunan Laporan Triwulan IV 5. Tealh dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2023	100.00	Dokumen	13	13		396,704,000	393,452,201	99.18%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui, Kepala Unit Kerja Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

[masih kosong]



2023